

Judul : Pemangkasan Belanja Ditolak
Tanggal : Jumat, 10 Juni 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 13

Pemangkasan Belanja Ditolak

● DEBBIE SUTRISNO

Penyerapan anggaran masih sesuai rencana pemerintah.

JAKARTA — Para wakil rakyat di DPR menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Penolakan ini muncul di tengah periode pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 antara pemerintah dan DPR beberapa waktu belakangan.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf menilai, pemotongan anggaran ini merupakan asumsi pemerintah di dalam penerimaan pajak yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, pemerintah langsung membuat konsep pemotongan secara besar-besaran berkisar antara 10 persen hingga 15 persen.

"Oleh karenanya, kami tidak setuju begitu saja. Kami akan melihat kembali mana yang urgen, mana program yang berjalan dan belum berja-

lan. Kami akan mencoba merundingkan apakah layak dipotong atau tidak," ujar Dede seperti dikutip laman resmi DPR, Kamis (9/6).

Anggota Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, ia tidak setuju dengan langkah pemerintah melakukan pemotongan anggaran. "Saya kira ini hal yang patut kita perhatikan betul-betul, apa yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan Nawacita. Saya tolak rekomendasi pemerintah. Kita harus tegas dalam hal ini, *masa* anggaran sudah kecil masih saja dipotong, bila perlu ditambah ini. Khusus Komisi IX penghematan kita tolak," katanya.

Komisi VIII DPR akan memperjuangkan agar anggaran Kementerian Sosial tidak dipotong. Berdasarkan instruksi Presiden, anggaran Kemensos dipangkas Rp 1,582 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa mengatakan, anggaran Kemensos tidak patut dipotong meskipun ada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai *disclaimer*. Hal itu masih dapat diperbaiki, tapi pemotongan anggaran juga tidak bisa dibiarkan.

"Pemerintah dengan teganya memotong anggaran untuk urusan orang tidak mampu. Kita (Komisi VIII) akan

milih program dan kegiatan yang menurut kita jangan dipotong karena ini memberikan dampak yang luar biasa," katanya. Ledia menambahkan, ini adalah perjuangan nyata kepada masyarakat dan fakir miskin.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas anggaran belanja K/L hingga Rp 50,016 triliun untuk RAPBNP 2016. Sejumlah K/L menyiasati agar pemangkasan anggaran tersebut tak mengganggu program prioritas mereka. Kebijakan pemangkasan dituangkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L.

Terkait kinerja anggaran K/L, Kementerian Keuangan mencatat penyerapan masih sesuai dengan rencana pemerintah. Sejumlah anggaran belanja mampu diserap secara maksimal.

"Sejauh ini kelihatannya dari K/L masih naik (penyerapannya). Belanja modal mereka juga tinggi," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Bahkan, sejauh ini tidak ada hambatan serius yang dihadapi K/L untuk menyerap anggaran. ■ **ed:** muhammad iqbal